PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI

maju bersama

Nomor : 090/DIR-DEPO/0426
Lamp : 1 (satu) bendel

Bekasi, 29 April 2026

Kepada Yth.
Ketua Umum DPP PERBARINDO dan Majalah Media BPR
Rumah Perbarindo
Komp. Patra II No. 46 Jl. Jend. A. Yani
Bypass Cempaka Putih, Jakarta Barat

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Depo Mitra Mandiri Melalui Perbarindo dan Majalah Media BPR Tahun 2025

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dimana sesuai pasal 102 poin (3) c. Yaitu BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada Asosiasi BPR di Indonesia (Perbarindo) dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan. Maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Tahun 2025 dalam aplikasi Sistem Informasi Perbarindo (SIP).

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi ke nomor telp. (021) 22817575 dengan Sdri. Kristia Ranggaini dan dapat juga memberikan informasi ke alamat email bpr.depomitramandiri_ojk@yahoo.com.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Depo Mitra Mandiri

Meulya Putri
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tembusan : - Dewan Komisaris BPR Depo Mitra Mandiri
- Arsip

Kantor Pusat : Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl. Transyogi RT. 001/010, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi 17435, Telp. (021) 2281 7575, Website : www.bprdepomitramandiri.co.id, Email : bpr.depomitramandiri@yahoo.co.id
Cabang Pondok Aren : Komplek Ruko Regia Blok RB-1 No. 36, Jl. Graha Bintaro Utama Tangerang Selatan 15226, Telp. (021) 7345 0840, Email : dmmpondokaren@yahoo.com
Cabang Cibinong : Komplek Ruko Perum Cibinong Griya Asri, Jl. KSR Dadi Kusmayadi Blok R3 No. 4 Cibinong 16914, Telp. (021) 8791 9767, Fax. (021) 8791 9768, Email : dmmcibinong@yahoo.co.id
Cabang Depok : Komplek Ruko Saladin Square B-27, Jl. Margonda Raya No. 39 Depok 16431, Telp. (021) 752 2323, Fax. (021) 7720 2767, Email : bpr.depomitramandiridepok@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

Nomor : 022/OJK-DEPO/0426
Lamp : 1 (satu) bendel

Bekasi, 29 April 2026

Kepada Yth.
Deputi Direktur Pengawasan LJK
OJK Jabodebek
Gedung Soemitra Djojohadikusumo Lt. 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : Penyampaian Laporan Tahunan Tata Kelola PT BPR Depo Mitra Mandiri posisi Tahun 2025

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dimana sesuai pasal 102 poin (3) a. Yaitu BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Tahun 2025 dalam aplikasi APOLO OJK.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi ke nomor telp. (021) 22817575 dengan Sdri. Fitra Setya Dwi Utami dan dapat juga memberikan informasi ke alamat email bpr.depomitramandiri_ojk@yahoo.com.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Depo Mitra Mandiri

Meulva Putri
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tembusan : - Dewan Komisaris BPR Depo Mitra Mandiri
- Arsip

Kantor Pusat : Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl. Transyogi RT. 001/010, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi 17435, Telp. (021) 2281 7575, Website : www.bprdepomitramandiri.co.id, Email : bpr.depomitramandiri@yahoo.co.id
Cabang Pondok Aren : Komplek Ruko Regia Blok RB-1 No. 36, Jl. Graha Bintaro Utama Tangerang Selatan 15226, Telp. (021) 7345 0840, Email : dmmpondokaren@yahoo.com
Cabang Cibinong : Komplek Ruko Perum Cibinong Griya Asri, Jl. KSR Dadi Kusmayadi Blok R3 No. 4 Cibinong 16914, Telp. (021) 8791 9767, Fax. (021) 8791 9768, Email : dmmcibinong@yahoo.co.id
Cabang Depok : Komplek Ruko Saladin Square B-27, Jl. Margonda Raya No. 39 Depok 16431, Telp. (021) 752 2323, Fax. (021) 7720 2767, Email : bpr.depomitramandiridepok@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Depo Mitra Mandiri

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039578-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600926-29042026134131

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

fitras@bprdepomitramandiri.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-29 13:41:31

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Dipindai dengan CamScanner

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI

maju bersama

Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Tahun 2025

TATA KELOLA PT. BPR DEPO MITRA MANDIRI (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE)*

Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri - *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai budaya. Budaya *Good Corporate Governance* (GCG) yang semakin kuat hingga mengakar akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT. BPR Depo Mitra Mandiri dalam bisnis dan pencapaian visinya. Dan Penerapan Tata Kelola menjadi faktor penilaian tingkat kesehatan BPR yang perlu diperhatikan penilaiannya.

Dengan Tata Kelola yang baik, tentunya perusahaan diharapkan tetap *survive* ditengah-tengah persaingan bisnis jasa keuangan yang semakin ketat. Tata Kelola yang baik menghadirkan manajemen perusahaan yang sehat dan profesional, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mewujudkan visi dan misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini kemudian akan semakin menguatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menekankan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dua hal penting. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Kedua hal tersebut diterapkan berdasarkan lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1. *Transparancy* (Keterbukaan), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggung jawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku.

4. *Independence* (Kemandirian), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun yang ingin dicapai PT. BPR Depo Mitra Mandiri dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Depo Mitra Mandiri ditujukan antara lain untuk :

a. Melaksanakan Visi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk menjadi "Perusahaan yang unggul, menghasilkan laba dan tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi harapan pemilik dan *stakeholder."*
b. Melaksanakan Misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk "Menjadi tempat yang sehat untuk berkarya, berkehidupan dan mengembangkan profesionalisme bagi seluruh karyawan."
c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders)* dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
e. Meningkatkan kepercayaan para investor.

2. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri dilakukan dengan mengacu kepada:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara

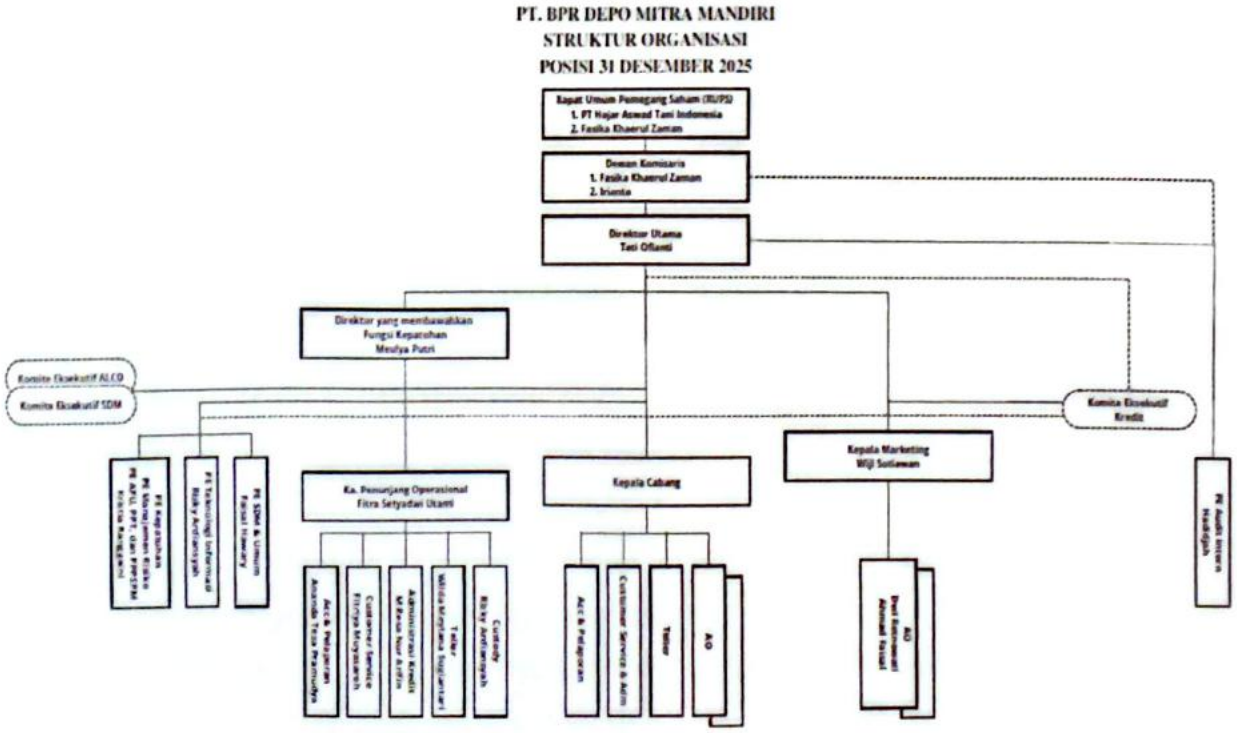
kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT. BPR Depo Mitra Mandiri dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Depo Mitra Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata kelola BPR

4. Struktur Organisasi PT. BPR Depo Mitra Mandiri

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PT. BPR Depo Mitra Mandiri mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola serta sistem pengendalian internal yang telah berjalan dengan baik.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri



Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direktur Utama;
4. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
5. Ka. Marketing;
6. Pejabat Eksekutif yang berfungsi sebagai :
    a. Pejabat Eksekutif Kepatuhan;
    b. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko;
    c. Pejabat Eksekutif APU dan PPT;
    d. Pejabat Eksekutif Teknologi Informasi;
    e. Pejabat Eksekutif SDM dan Umum;
    f. Pejabat Eksekutif Audit Intern
7. Ka. Cabang;
8. Ka. Penunjang Operasional.
9. Terdapat juga Pejabat Eksekutif yang merangkap sebagai Petugas Strategi Anti Fraud dan Petugas Integritas Pelaporan Keuangan.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola *(Good Corporate Governance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Perekonomian Rakyat, mengungkap seluruh aspek penerapan Tata Kelola paling kurang meliputi :

a. Ringkasan Hasil Penilaian *(Self Assessment)* atas Penerapan Tata Kelola
b. Pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu :
    i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi.
    ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.
    iii. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
c. Kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu:
    i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR.
    ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
d. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :
    i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.
    ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
e. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu :
    i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.
    ii. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
f. Hubungan keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :
    i. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.
    ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
g. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
h. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
i. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun.
j. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.
k. Jumlah Penyimpangan Intern *(Internal Fraud)*.
l. Permasalahan hukum yang dihadapi.
m. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
n. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain.

2. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 periode semester 1 dan semester 2.

C. TRANSPARASI PENERAPAN TATA KELOLA

a. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl. Transyogi RT.001/010, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi 17435
Nomor Telepon	: (021) 2281 7575
Penjelasan Umum	: Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independent dan Fairness.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola	: Nilai 2 (dua)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola	: Manajemen BPR Depo Mitra Mandiri telah melakukan penerapan tata kelola dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen BPR.

b. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola yaitu :

i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK*)	: 3276066410770005
	Nama	: Teti Ofianti
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Direktur Utama bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. Penghimpunan Dana; c. Penyaluran Dana; d. Edukasi, Literasi dan Inklusi; e. Pengembangan Bisnis.	

2.	NIK*)	: 3201135409910001
	Nama	: Meulya Putri
	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Fungsi Kepatuhan; b. Fungsi Manajemen Risiko; c. Fungsi APU dan PPT; d. Fungsi Strategi Anti Fraud; e. Fungsi Integritas Pelaporan Keuangan; f. Teknologi Informasi; g. Sumber Daya Manusia dan Umum; h. Penunjang Operasional.	

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**):

1. Direksi terus melakukan upaya pemenuhan target, terutama kredit yang sehat dengan memaksimalkan database nasabah lunas, nasabah aktif setengah tenor dan nasabah extracontable, meningkatkan terus UMKM dan kredit kepada perusahaan
2. Setiap periode bagian SDM melakukan rekrutmen tenaga pemasaran baik melalui media sosial BPR maupun holding untuk pemenuhan dibidang pemasaran.
3. Terkait dengan pengembangan produk terutama tabungan akan dilakukan pengembangan untuk tabungan berjangka seperti tabungan hari raya dan tabungan berhadiah, dimana akan melakukan rekrutmen karyawan salah satunya untuk melakukan pengembangan produk BPR
4. Terkait dengan merger telah melakukan koordinasi dengan BPR DMS baik dari segi bisnis maupun operasional.
5. Telah dilakukan evaluasi pemberian insentif yang dapat meningkatkan motivasi pencapaian target kredit, sehingga tahun 2026 akan diberikan kembali untuk insentif pemenuhan pencapaian kredit.

ii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK*)	: 3173052712720009
	Nama	: Fasika Khaerul Zaman
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris Utama bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. Penghimpunan Dana; c. Penyaluran Dana; d. Edukasi, Literasi dan Inklusi; e. Pengembangan Bisnis.	
2.	NIK*)	: 3173020106630005
	Nama	: Irianto
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Fungsi Kepatuhan; b. Fungsi Manajemen Risiko; c. Fungsi APU dan PPT; d. Fungsi Strategi Anti Fraud; e. Fungsi Integritas Pelaporan Keuangan; f. Teknologi Informasi; g. Sumber Daya Manusia dan Umum; h. Penunjang Operasional.	
Rekomendasi kepada Direksi: 1. Mendukung Direksi untuk memaksimalkan database nasabah lunas, nasabah aktif setengah tenor dan nasabah extracontable, meningkatkan terus pembiayaan kepada UMKM dan melakukan Analisa secara mendalam untuk kredit perusahaan.		

2. Melakukan rekrutmen tenaga pemasaran untuk dapat membantu peningkatan pertumbuhan dana dan kredit.
3. Melakukan pengembangan produk dana terutama tabungan.
4. Pemantauan secara berkala terhadap perkembangan penggabungan dengan BPR Dana Mitra Sakti.
5. Mendukung pemberian insentif realisasi untuk tenaga pemasaran dan penunjang operasional yang disampaikan oleh Direksi dan agar dilakukan evaluasi secara berkala.

iii. Tidak terdapat Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

c. Kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu :

i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	424,000,000	5	287,000,000	5
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

d. Kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :

i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

e. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu :

i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

f. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :

i. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

g. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS yaitu :

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1	Gaji	2	696,960,000	2	274,320,000
2	Tunjangan	2	280,355,650	2	36,262,500
3	Tantiem	2	299,375,000	2	125,625,000
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
5	Remunerasi lainnya	2	145,200,000	2	57,150,000
Total Remunerasi			1,421,890,650		493,357,500
No	Jenis Fasilitas Lain				
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	2	473,350,600	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			473,350,600		-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1,895,241,250		493,357,500

h. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah yaitu :

No	Keterangan	Skala Perbandingan
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2.51 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.78 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.33 : 1
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	3.87 : 1
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	4.74 : 1

i. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun yaitu :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-Jan-25	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Progres Penggabungan BPR DMM dan BPR DMS - Laporan Literasi dan Inklusi - Lain-lain

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
2	5-Feb-25	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Progres Penggabungan BPR DMM dan BPR DMS - Laporan Literasi dan Inklusi - Kepatuhan Pelaksanaan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat - Lain-lain
3	12-Mar-25	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Progres Penggabungan BPR DMM dan BPR DMS - Laporan Literasi dan Inklusi - Kepatuhan Pelaksanaan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
4	18-Jun-25	2	- Strategi Bisnis dan Kebijakan - Isu Strategis BPR - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis - Hasil Pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM - Pemantauan hasil Audit OJK - Lain-lain - Saran-saran dari Dewan Komisaris atas hasil evaluasi pencapaian bisnis bulan Mei 2025
5	18-Jul-25	2	- Strategi Bisnis dan Kebijakan - Isu Strategis BPR - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis - Hasil Pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM - Pemantauan hasil Audit OJK - Lain-lain - Saran-saran dari Dewan Komisaris atas hasil evaluasi pencapaian bisnis bulan Juni 2025
6	12-Aug-25	2	- Prestasi BPR DMM - Arahan BOD - Arahan BOC
7	17-Oct-25	2	- Strategi Bisnis dan Kebijakan - Isu Strategis BPR - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis - Hasil Pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM - Pemantauan hasil Audit OJK - Lain-lain - Saran-saran dari Dewan Komisaris atas hasil evaluasi pencapaian bisnis bulan September 2025

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
8	19-Nov-25	2	- Strategi Bisnis dan Kebijakan - Isu Strategis BPR - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis - Hasil Pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM - Pemantauan hasil Audit OJK - Lain-lain - Saran-saran dari Dewan Komisaris atas hasil evaluasi pencapaian bisnis bulan Oktober 2025
9	23-Dec-25	2	- Strategi Bisnis dan Kebijakan - Isu Strategis BPR - Evaluasi Kebijakan Strategis - Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis - Hasil Pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM - Pemantauan hasil Audit OJK - Lain-lain - Saran-saran dari Dewan Komisaris atas hasil evaluasi pencapaian bisnis bulan November 2025

j. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris yaitu :

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	9	0	100%
2	3173020106630005	Irianto	9	0	100%

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah Fasika Khaerul Zaman dan Irianto dengan frekuensi kehadiran fisik 9 kali.

k. Jumlah penyimpangan intern *(internal fraud)* yaitu :

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Selama tahun 2025 PT. BPR Depo Mitra Mandiri terdapat 1 (satu) penyimpangan internal yang dilakukan oleh Pegawai Tetap yang saat ini masih dalam proses penyelesaian dengan laporan sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
melalui proses hukum		0		0		0		0

l. Permasalahan hukum yang dihadapi yaitu :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi selama tahun 2025.

m. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Depo Mitra Mandiri tidak ada, adapun laporannya sebagai berikut :

No	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kepentingan politik selama periode tahun 2025 tidak ada, Adapun laporannya sebagai berikut :

No	Tanggal Pelasanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-	-

D. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2025.

Pada tahun 2025, PT. BPR Depo Mitra Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek Kualitatif dan
2. Aspek Kuantitatif

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat penerapan Tata Kelola diterapkan pada 12 (dua belas) Faktor Penilaian, namun dikarenakan PT. BPR Depo Mitra Mandiri memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- maka untuk faktor

Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan fungsi komite tidak dinilai, maka faktor yang dinilai hanya sebanyak 11 (sebelas) faktor yaitu:

1. Aspek pemegang saham;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit BPR;
10. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
11. Rencana bisnis BPR.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada Tahun 2025 semester 2 dengan total penilaian tata kelola 2 dan dikategorikan ke dalam **"Peringkat 2 (dua)".**

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Depo Mitra Mandiri Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Tahun 2025

Nilai Komposit	Predikat Komposit
2	Peringkat 2 (dua)

Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek Kualitatif dan Kuantitatif pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sudah baik sesuai penilaian dari hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola.
2. Manajemen BPR Depo Mitra Mandiri telah melakukan penerapan tata kelola dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen BPR.
3. Pemegang Saham berkomitmen untuk memperkuat permodalan BPR
4. Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala
5. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain
6. Struktur organisasi telah lengkap sehingga mendukung pelaksanaan tata kelola dengan baik

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Posisi Laporan tahun 2025.

Bekasi, 30 Maret 2026

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
Teti Ofianti	Fasika Khaerul Zaman
Direktur Utama	Komisaris Utama